

Analisis Implementasi Hukum dan Nilai Pancasila dalam Perlindungan Hak Asasi Yang Dimiliki Oleh Manusia

Faturohman¹, Silvia amanah², Zakia AriKinanti³

Universitas Bina Bangsa

arturcikaseban@gmail.com¹, amanahsilvi@gmail.com², kiaaakle@gmail.com³

ABSTRACT

Implementation of the principles of the rule of law and Pancasila democracy in the context of protecting the rights of every human being in Indonesia. The values associated with Pancasila, in protecting one's rights, are very diverse. The first value of Pancasila, if it is related to the rights that every human being has, means affirming recognition of God the Creator. The second value is that humans have equal dignity and rights that must be respected by each other. The values of Pancasila must be put forward in order to unite the Indonesian nation, so that the Indonesian state becomes one united nation. The fourth principle, if related to the rights possessed by humans, emphasizes the importance of fair distribution of resources and opportunities, as well as being able to overcome all forms of injustice in society. Finally, the fifth principle is related to the rights possessed by every human being, meaning that the value of Pancasila places greater emphasis on the importance of democratic governance, by providing space for participation for citizens to be active in society.

Keywords: Rights, Pancasila values, and protection of human rights

ABSTRAK

Implementasi pada suatu prinsip pada negara yang hukum serta demokrasi pada nilai pancasila dalam konteks perlindungan pada hak asasi yang dimiliki manusia. Pancasila dalam konteks hak asasi terhadap manusia ini dapat memberikan sebuah rekomendasi tentang kebijakan yang relevan, untuk memperkuat perlindungan pada hak yang dimilikinya. Pancasila, ini didasari oleh filosofis yang ada di suatu negara, pancasila yang memiliki nilai-nilai yang sangat berharga bisa dapat menadari akan perlindungan pada hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Nilai yang terkait dengan pancasila, dalam melindungi hak nya ini sangat beragam. Nilai pancasila yang pertama, jika dikaitkan dengan hak-hak yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, ini berarti menegaskan akan pengakuan kepada tuhan sang pencipta. Nilai kedua, ialah manusia memiliki martabat yang sama dan hak-hak yang harus di hormati itu sama lain. Nilai pancasila, harus dikedepankan guna mempersatu bangsa Indonesia, agar negara Indonesia menjadi satu padu. Sila yang keempat, jika dikaitkan dengan hak yang dimiliki oleh manusia, ini menekankan akan pentingnya distribusi yang adil dari sumber daya dan juga kesempatan, serta dapat penanggulangan dengan segala bentuk ketidakadilan di dalam masyarakat. Terakhir, ialah sila kelima jika dikaitkan dengan hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia, berarti nilai dari pancasila ini lebih menekankan akan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dengan memberikan ruang bagi partisipasi kepada warga agar aktif dalam masyarakat.

Kata Kunci : Hak, nilai pancasila, dan perlindungan hak pada manusia

PENDAHULUAN

Doktrin tentang hak-hak yang wajib dimiliki oleh manusia ini mengacu tentang seperangkat prinsip serta nilai yang menegaskan tentang hak-hak yang inheren yang dimiliki oleh setiap manusia, secara universal, tanpa danya diskriminasi apapun. Hak pada manusia ialah hak yang sudah melekat pada setiap individu, hanya karena mereka ialah manusia tanpa memandang faktor apapun seperti misalnya ras, agama, jenis kelamin, status sosial atau kebangsaan.

Menurut harfiah, hak ini mengacu tentang suatu kebebasan atau keistimewaan yang diberikan kepada setiap individu. Sedangkan, asasi dapat menunjukkan tentang hak-hak ini

ialah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari eksistensi manusia. Manusia ini menekankan bahwa hak-hak yang berlaku pada setiap manusia, tidak peduli pada latar belakang atau karakteristik pada setiap individu. Perkembangan selanjutnya ialah adanya jaminan mengenai hak yang dimiliki oleh manusia ini harus tercantum di dalam Undang-undang dasar atau yang sudah di tetapkan. Di Indonesia, penegakan pada hak yang dimiliki oleh manusia ini , telah menjadi fokus penting dalam pembangunan demokrasi dan keadilan sejak reformasi pada tahun 1998. Meskipun demikian, tantangan dalam penegakan yang dihadapi oleh hak-hak asasi masih ada, dan upaya terus dapat dilakukan, untuk dapat memperbaiki dan memperkuat mekanisme penegakkan.

Upaya yang dilakukan oleh penegakkan ialah pemerintah Indonesia telah membentuk lembaga-lembaga khusus untuk mempromosikan serta menjaga hak pada manusia. Lembaga-lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk dapat memantau, serta menyelidiki dan juga memberikan rekomendasi terkait dengan pelanggaran yang dimiliki setiap manusia. Contoh kasusnya ialah, terjadi konflik yang ada di aceh, terdapat sebuah laporan tentang pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh setiap manusia, yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, termasuk pembunuhan, penyiksaan. dan penghilangan paksa.

Yang kedua, ialah konflik antara pemerintah Indonesia dan kelompok separatis yang ada di papua juga telah menyebabkan pelanggaran pada hak yang dimiliki oleh manusia, seperti pembunuhan. Yang ketiga, ialah selama periode sebelum reformasi pada tahun 1998, terjadi banyak kasus penghilangan paksa dan penindasan politik terhadap aktivis, mahasiswa, dan kritikus dari pemerintah. Kasus-kasus ini masih menimbulkan trauma dan rasa tidak puas di kalangan masyarakat.

Adanya kelompok-kelompok terhadap minoritas, seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender), seringkali menjadi korban pelanggaran hak pada manusia, baik dalam bentuk diskriminasi, kekerasan, maupun keterbatasan akses terhadap layanan publik dan keadilan. Menurut M. Tahir Azharry, menyebutkan bahwa ada salah satu ciri dari hukum, yang ada di negara Indonesia, yang dimana pancasila ini memiliki nilai-nilai yang terkait akan pentingnya melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia.

Rumusan Masalah

1. Apa implementasi dari pelanggaran hak pada manusia terhadap stabilitas politik, sosial, dan ekonomi Indonesia, serta bagaimana prinsip-prinsip pancasila digunakan untuk menanggapi tantangan ini?

2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam memperkuat perlindungan hak, yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi pancasila?

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis, yang dimana hukum yuridis ialah pendekatan dalam menganalisis, memahami dan menyelesaikan masalah hukum dengan berfokus pada norma-norma, peraturan-peraturan dan juga Undang-undang yang berlaku. Dan juga, penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis. Metode deskriptif ialah metode yang dilakukan oleh penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan tentang suatu keadaan yang sesuai dengan fakta, tanpa melakukan manipulasi variable atau intervensi, Metode analitis adalah suatu pendekatan atau cara pendekatan yang dilakukan oleh penelitian dengan cara menganalisis sebuah laporan atau masalah yang di teliti.

PEMBAHASAN

Implementasi dari pelanggaran hak pada manusia terhadap stabilitas politik, sosial, dan ekonomi Indonesia, dan prinsip-prinsip dari pancasila

Konsep pada hukum ini telah diatur di dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ialah negara Indonesia, merupakan negara hukum yang sangat aktif dan dinamis. Model negara hukum seperti ini dapat menjadikan sebagai pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip welvaarstaa. Pelanggaran pada hak yang dimiliki oleh manusia ini memiliki dampak yang serius pada stabilitas politik, sosial, dan ekonomi Indonesia, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip pada pancasila yang menjadi dasar negara.

Implementasi dari pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh manusia terhadap stabilitas politik, sosial, dan ekonomi Indonesia, serta prinsip-prinsip yang dimiliki oleh nilai pancasila ialah :

1. Pelanggaran pada hak yang dimiliki oleh manusia ini dapat menciptakan ketidakstabilan politik dengan memicu protes, demonstrasi, atau bahkan adanya konflik berskala besar. Ketidakpuasan terhadap pemerintah karena pelanggaran tentang hak dapat mengancam legitimasi rezim dan berpotensi mengganggu stabilitas politik secara keseluruhan
2. Pelanggaran pada hak juga dapat mengganggu stabilitas sosial dengan menciptakan ketegangan antar kelompok masyarakat. Ketidakadilan dalam perlakuan terhadap individu atau kelompok tertentu dapat memperburuk ketegangan antara kelompok etnis, agama, atau sosial di masyarakat.

3. Pelanggaran hak dapat ini pun dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi kepercayaan investor dan memicu sanksi internasional. Negara-negara dan lembaga internasional sering kali menuntut perubahan perilaku atau pun memberlakukan sanksi ekonomi terhadap negara yang telah melanggar haknya, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia.
4. Pancasila, sebagai falsafah dasar negara Indonesia, menekankan pada nilai-nilai seperti keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kesejahteraan sosial. Pelanggaran pada hak yang dimiliki oleh manusia ini dapat bertentangan dengan nilai-nilai pancasila, karena melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan untuk semua warga negara. Oleh karena itu, pelanggaran hak dapat melemahkan fondasi ideologis negara.

Implementasi pelanggaran hak pada manusia dapat memiliki dampak yang signifikan pada stabilitas politik, sosial, dan ekonomi Indonesia, serta pada prinsip-prinsip pancasila, yakni :

1. Pelanggaran hak dapat merusak stabilitas politik dengan menciptakan ketidakpuasan publik terhadap pemerintah atau lembaga yang terkait dan sistem politik. Ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dapat memicu protes, demonstrasi, bahkan pemberontakan. Ini bisa mengakibatkan ketidakstabilan politik, bahkan adanya pergantian rezim, yang berdampak buruk pada proses demokratisasi Indonesia.
2. Pelanggaran hak juga dapat memicu ketegangan sosial antar kelompok masyarakat. Diskriminasi terhadap sesuatu seperti rasial, agama, atau etnis, serta penindasan terhadap kelompok minoritas, dapat memperburuk konflik antar kelompok. Hal ini bisa mengganggu kerukunan sosial, memperburuk polarisasi, dan bahkan menyebabkan kekerasan antar kelompok.
3. Pelanggaran hak juga berdampak pada stabilitas ekonomi. Ketidakstabilan politik dan sosial sering kali menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penindasan terhadap hak-hak pekerja, seperti hak untuk bekerja dengan upah yang sangat adil dan kondisi kerja yang aman, dapat mengganggu produktivitas dan kemakmuran ekonomi.
4. Pelanggaran hak juga bertentangan dengan prinsip-prinsip pancasila, yang menempatkan martabat manusia, keadilan sosial, dan demokrasi sebagai nilai-nilai utama. Pelanggaran hak seperti penindasan, diskriminasi, dan pelanggaran terhadap kebebasan individu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Upaya untuk

memperbaiki pelanggaran terhadap hak dapat memperkuat fondasi demokrasi dan keadilan sosial yang diusung oleh Pancasila.

Salah satu contoh pelanggaran hak yang dapat mengganggu stabilitas politik, sosial, dan ekonomi Indonesia adalah adanya ketidaksetaraan terhadap ekonomi yang dapat menciptakan kesenjangan sosial yang besar. Ketidaksetaraan ekonomi dapat mengakibatkan ketegangan sosial dan politik karena dapat menciptakan ketidakpuasan, ketidakadilan, dan ketidakstabilan di antara berbagai kelompok masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki prinsip-prinsip yang mencakup:

1. Ketuhanan yang maha esa, ialah prinsip ini lebih menekankan kepada pentingnya keberagaman dalam kepercayaan dan agama serta menghormati kebebasan beragama bagi setiap individu.
2. Kemanusiaan yang adil, ialah suatu prinsip yang dapat menjelaskan tentang pentingnya menghormati martabat dan hak-hak yang ada pada manusia, serta memastikan keadilan sosial bagi semua warga negara.
3. Persatuan negara Indonesia, ialah prinsip ini menjelaskan tentang atau lebih menekankan kepada pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya.
4. Kerakyatan yang dipimpin, yakni nilai dari Pancasila ini menjelaskan atau lebih menekankan kepada pentingnya demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah dan mufakat serta melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat, ialah prinsip ini lebih menegaskan atau menjelaskan akan pentingnya pemerataan pembangunan dan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia, tanpa diskriminasi.

Partisipasi masyarakat dalam memperkuat perlindungan hak

Masyarakat merupakan sekumpulan orang-orang yang ada di suatu daerah. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam memperkuat perlindungan hak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh masyarakat, terkait dengan partisipasi yang dilakukannya ialah:

1. Melakukan pendidikan dan penyuluhan, ialah upaya yang dilakukan setiap manusia, khususnya warga ini perlu diberikant tentang ilmu yang baik dan juga memberikan pelajaran akan pentingnya menjaga hak-hak yang ada pada mereka dan bagaimana cara melindungi hak-hak tersebut. Pendidikan dan penyuluhan tentang hak-hak yang dimiliki oleh manusia, demokrasi, serta nilai-nilai yang dimiliki oleh Pancasila, yang bertujuan

untuk mendapatkan peningkatan akan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam proses perlindungan hak.

2. Organisasi masyarakat, ialah masyarakat dapat membentuk organisasi atau lembaga yang berfokus pada advokasi dan perlindungan hak-hak mereka. Organisasi seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), serikat buruh, organisasi petani, dan kelompok advokasi hak pada manusia, dan lainnya yang dapat memberikan suara kepada masyarakat dan memperjuangkan kepentingan mereka.
3. Partisipasi politik, ialah adanya partisipasi yang dilakukan oleh lembaga yang terkait dengan politik
4. Konsultasi dan musyawarah, yakni suatu prinsip demokrasi yang dimiliki oleh Pancasila akan menekankan pentingnya suatu musyawarah dalam pengambilan keputusan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melibatkan masyarakat dalam proses konsultasi dan musyawarah terkait. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan mendiskusikan solusi secara bersama-sama.
5. Akses terhadap sistem peradilan, ialah masyarakat perlu diberikan akses yang mudah dan adil ke sistem peradilan untuk melindungi hak-hak mereka. Sistem peradilan yang independen dan transparan merupakan bagian integral dari demokrasi Pancasila dan memungkinkan masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka melalui proses hukum.

Partisipasi aktif masyarakat dalam memperkuat perlindungan hak sangatlah penting karena sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Pancasila. Dalam prinsip demokrasi Pancasila, setiap manusia wajib memiliki hak yang sama, ialah adil satu sama lain. Dengan berpartisipasi aktif, masyarakat dapat memastikan bahwa hak-hak tersebut ditegakkan tanpa diskriminasi. Partisipasi masyarakat memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengkritisi kinerja pemerintah.

Dengan aktif berpartisipasi, masyarakat dapat menuntut akuntabilitas dari para pemimpinnya untuk memastikan bahwa suatu kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan rakyat dan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Partisipasi masyarakat dapat mendorong transparansi dalam suatu pengambilan keputusan yang dilakukan dengan benar. Dengan mengawasi dan mengkritisi proses tersebut, masyarakat dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil secara terbuka dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Partisipasi masyarakat dalam berbagai proses politik dan juga sosial ini dapat meningkatkan legitimasi pada pemerintah. Ketika masyarakat merasa bahwa hak-hak mereka dapat dihormati dan suara mereka didengar, mereka akan lebih cenderung mendukung dan

mematuhi kebijakan pemerintah. Dengan partisipasi aktif, masyarakat dapat memberikan masukan serta ikut berkontribusi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan mencakup kepentingan semua lapisan masyarakat dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat adalah kunci untuk memperkuat suatu perlindungan hak dan mewujudkan suatu prinsip yang didapatkan di dalam demokrasi yang terkait dengan nilai-nilai yang sudah tertera. Dan juga pastinya memiliki dampak yang positif, seperti :

1. Penguatan demokrasi, ialah adanya partisipasi aktif masyarakat memperkuat esensi demokrasi sebagai pilar utama dalam sistem pemerintahan Indonesia yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila. Dengan berpartisipasi dalam berbagai proses politik dan pembuatan keputusan, masyarakat dapat secara langsung memengaruhi arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
2. Peningkatan akuntabilitas, ialah melalui partisipasi masyarakat, pemerintah dan lembaga-lembaga publik yang dipaksa untuk lebih akuntabel terhadap kebutuhan serta kepentingan rakyat. Dengan memonitor dan mengevaluasi kinerja dari pemerintah, masyarakat dapat menuntut pertanggungjawaban atas kebijakan dan tindakan yang diambil.
3. Perlindungan pada hak-hak manusia, dengan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam memperkuat suatu perlindungan hak ini dapat membantu memastikan bahwa hak-hak asasi manusia ini dapat dihormati dan dilindungi secara efektif. Masyarakat yang aktif dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran hak kepada otoritas yang berwenang, sehingga memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia.
4. Keterlibatan yang sangat merata, ialah masyarakat yang ikut berpartisipasi aktif dapat memastikan bahwa suara serta kepentingan semua kelompok masyarakat ini dapat didengar dan dipertimbangkan dalam proses pembuatan keputusan. Hal ini dapat membantu menciptakan keterlibatan yang merata dari seluruh lapisan pada masyarakat, sehingga mendorong inklusi sosial dan pengurangan ketimpangan.
5. Penguatan pada nilai-nilai yang dimiliki oleh Pancasila, ialah masyarakat yang aktif dalam partisipasi ini dapat memperkuat suatu perlindungan hak dan juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh Pancasila, seperti gotong royong, musyawarah-mufakat, dan keadilan sosial. Melalui partisipasi ini, masyarakat dapat memperkuat dan menentukan nilai dari Pancasila di kehidupan manusia sehari-hari

Jika masyarakat tidak aktif dalam berpartisipasi untuk memperkuat perlindungan hak yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi pancasila, maka beberapa dampak yang mungkin terjadi ialah :

1. Adanya penurunan akan kualitas demokrasi, ialah partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu fondasi utama dari sistem demokrasi. Jika masyarakat tidak aktif dalam berpartisipasi, maka proses pengambilan keputusan dapat menjadi tidak representatif dan tidak mencerminkan kepentingan seluruh rakyat.
2. Pemiskinan pada hak yang dimiliki oleh manusia, adanya ketidakpartisan di dalam memperjuangkan hak-hak yang dimiliki oleh manusia, ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran pada hak manusia, dan penindasan terhadap kelompok-kelompok yang rentan di masyarakat.
3. Meningkatnya korupsi dan kekerasan, yang dimana ketika masyarakat tidak aktif dalam mengawasi pemerintah serta lembaga-lembaga publik, peluang untuk terjadinya korupsi dan kekerasan oleh pihak yang berwenang dapat meningkat.
4. Adanya peningkatan akan keetidakadilan sosial dan ekonomi, ialah tanpa adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat, pemerintah mungkin tidak mendengarkan kebutuhan dan aspirasi rakyat secara tepat. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan ketidakadilan sosial dan ekonomi dalam distribusi sumber daya dan kesempatan.
5. Lemahnya stabilitas politik dan sosial, ialah adanya ketidakpartisan pada masyarakat ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik dan sosial karena kurangnya dukungan terhadap institusi-institusi demokratis dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Partisipasi masyarakat dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa keberhasilan dan keberlanjutan upaya perlindungan pada hak yang dimiliki oleh manusia. Adapula. contoh partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam perlindungan hak yang dimiliki oleh manusia di negara Indonesia, ialah :

1. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), ialah organisasi masyarakat sipil seperti LSM, kelompok advokasi pada hak manusia, dan organisasi-organisasi tentang hak-hak perempuan aktif dalam memantau, melaporkan, dan membela kasus-kasus pelanggaran hak yang ada di Indonesia. Mereka juga melakukan suatu advokasi untuk reformasi suatu kebijakan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak asasi pada manusia
2. Aktivis pada hak yang dimiliki oleh manusia dan pengacara, ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh hak pada manusia serta pengacara bekerja untuk memberikan

bantuan hukum kepada korban pelanggaran hak asasi pada manusia, termasuk dapat memberikan pendampingan hukum dan advokasi di pengadilan.

3. Jurnalis dan media, ialah jurnalis dan media ini memiliki peran penting dalam mempublikasikan kasus-kasus pelanggaran pada hak manusia, ini memberikan liputan yang mendalam tentang isu-isu pada hak yang dimiliki oleh manusia, dan membangkitkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh manusia
4. Pendidikan dan penyuluhan, ialah dilakukannya suatu program-program tentang pendidikan dan penyuluhan tentang pentingnya hak pada manusia, di sekolah-sekolah, universitas, dan masyarakat umum yang bertujuan guna meningkatkan kesadaran pada masyarakat, akan pentingnya menjaga, dan juga menghormati hak-hak yang ada pada manusia.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak yang dimiliki oleh manusia ialah merupakan suatu landasan hukum utama yang mengatur tentang suatu pengawasan akan pentingnya hak yang ada pada manusia. Dalam menganalisis implementasi hukum dan demokrasi pada nilai-nilai yang ada pada Pancasila dalam undang-undang tersebut, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Konsep negara hukum menekankan pada supremasi hukum dan perlindungan hak asasi pada manusia, yang dimana merupakan suatu prinsip utama.

Undang-undang terhadap hak asasi pada manusia ini dapat mencerminkan aspek negara hukum dengan menerapkan suatu dasar hukum yang dimilikinya. Undang-undang ini menetapkan standar dan mekanisme untuk mengakui, melindungi, dan menegakkan hak-hak yang ada pada manusia yang dilakukan secara adil seadil adilnya. Dalam konteks perlindungan pada hak yang dimiliki oleh manusia, implementasi pada undang-undang hak ini, harus mencerminkan kepada prinsip-prinsip demokrasi yang dimiliki oleh Pancasila dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan terhadap pelanggaran hak yang dimilikinya.

Implementasi pada hak-hak yang dimiliki oleh manusia ini harus dapat memastikan, adanya suatu keterbukaan serta akuntabilitas dari pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi haknya. Hal ini mencakup transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, akses informasi publik, serta mekanisme pengaduan dan penegakan hukum yang efektif. Implementasi pada hak asasi ini, harus menjamin penegakan hukum yang adil dan berkeadilan bagi pelanggar hak yang dimiliki oleh manusia. Ini melibatkan proses pengadilan

yang independen, transparan, dan tidak diskriminatif, serta sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran hak.

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, analisis tentang implementasi telah di atur dan ditetapkan pada undang-undang yang mengatur tentang hak yang dimiliki oleh manusia, dalam konteks negara hukum dan demokrasi pancasila dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana upaya dalam menjaga hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Agar, hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia tetap di pertahankan dan tidak di ganggu oleh orang lain.

Partisipasi masyarakat yang aktif dalam perlindungan hak yang dimiliki oleh manusia ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi dan dihormati oleh pemerintah serta lembaga-lembaga terkait. Berikut adalah beberapa contoh partisipasi masyarakat yang dapat diterapkan dalam upaya perlindungan hak asasi pada manusia :

1. Pengawasan public, ialah masyarakat ini dapat aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan dari pemerintah serta lembaga negara terkait dengan hak pada manusia. Hal ini dapat dilakukan melalui suatu pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan penegakan hukum.
2. Masyarakat dapat membentuk kelompok advokasi atau dapat melakukan kampanye untuk memperjuangkan isu-isu tentang hal-hal yang dianggap penting. Misalnya, adanya hak terhadap wanita, hak dalam mengawasi anak, dan juga hak-hak lainnya yang perlu diawasi dan dilindungi oleh pemerintah.

Daftar Pustaka

- Assiddiqie, J. (2012). *Hukum Tata Negara dan Pilar- Pilar Demokrasi*,. Jakarta: Sinar.
- Durkheim, Emile. . (1990). *Pendidikan Moral Suatu Studi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sudarmanto. (2012). *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Wijaya, Made H. (. (2015). Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Advokasi*, 199-213.